

## Kajian Teoretis Civic Responsibility dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Nurlailah\*

STKIP Al Amin Dompu

Email coresponden author\*: [lailahnur290@gmail.com](mailto:lailahnur290@gmail.com)

### Abstrak

*Civic responsibility merupakan salah satu tujuan penting dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) karena berkaitan dengan pembentukan warga negara yang bertanggung jawab, partisipatif, dan berkarakter demokratis. Namun, dalam praktik pembelajaran, penguatan civic responsibility sering kali belum terimplementasi secara optimal karena pembelajaran PKn masih cenderung berorientasi pada aspek kognitif dan teoritis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara teoretis konsep, dimensi, serta peran civic responsibility dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, serta mengidentifikasi pendekatan pembelajaran yang relevan untuk penguatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian teoretis (literature review) terhadap artikel jurnal nasional dan internasional, buku akademik, serta dokumen kebijakan yang relevan dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir (2015–2025). Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi dan analisis tematik untuk mensintesis temuan-temuan utama dari literatur yang dikaji. Hasil kajian menunjukkan bahwa civic responsibility mencakup dimensi tanggung jawab sosial, partisipasi kewarganegaraan, kepatuhan terhadap hukum dan norma, serta etika publik. Pembelajaran PKn yang kontekstual, partisipatif, dan didukung pemanfaatan media digital secara pedagogis memiliki potensi besar dalam memperkuat civic responsibility peserta didik. Kajian ini diharapkan dapat menjadi landasan konseptual bagi pengembangan pembelajaran dan penelitian lanjutan di bidang Pendidikan Kewarganegaraan.*

**Keywords:** *Civic responsibility, Pendidikan Kewarganegaraan, pembelajaran kontekstual, media digital, kajian teoretis*

### PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memegang peranan penting dalam membentuk warga negara yang bertanggung jawab, demokratis, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi negara. Pendidikan ini tidak hanya menekankan pemahaman normatif tentang hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga pembentukan sikap dan perilaku yang mencerminkan *civic responsibility*, yaitu kesadaran dan komitmen individu untuk berperan aktif dalam kehidupan demokratis (Borhan, 2025). Dalam konteks berada di tengah tantangan global seperti perubahan sosial, digitalisasi, dan krisis iklim, pemahaman akan tanggung jawab kewarganegaraan menjadi semakin penting untuk memastikan keterlibatan aktif generasi muda dalam pembangunan sosial dan politik yang berkelanjutan.

*Civic responsibility* merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan kewarganegaraan karena mencakup kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab serta kemampuan untuk melakukan partisipasi yang bertanggung jawab dan bermakna dalam masyarakat (Hasanah, 2024). *Civic responsibility* tidak hanya mencakup sikap pro-sosial dan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga kesiapan untuk menyelesaikan masalah bersama dan berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat (Fierna et al., 2025). Di dalam PKn, aspek ini menjadi tujuan pembelajaran yang penting karena merupakan pondasi bagi kemampuan siswa atau mahasiswa untuk berpikir dan bertindak sebagai warga negara yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab.

Namun dalam praktik pembelajaran PKn di banyak lembaga pendidikan, termasuk di perguruan tinggi, terdapat tantangan dalam menanamkan *civic responsibility* secara efektif. Studi menunjukkan bahwa pembelajaran sering kali berorientasi pada aspek kognitif — hafalan konsep dan kurang memberi ruang bagi pengalaman langsung dan refleksi kritis terhadap isu-isu sosial nyata (Murtiningsih et al., 2022). Kondisi ini cenderung menghambat internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan karena mahasiswa tidak dipacu untuk mempraktikkan sikap tanggung jawab secara nyata dalam konteks kehidupan sosial dan demokratis mereka. Hal ini semakin relevan di era digital, di mana fenomena informasi digital dan interaksi maya juga memberi tantangan baru terhadap tanggung jawab *civics* peserta didik (Borhan, 2025).

Selain itu, literature terkini menunjukkan bahwa integrasi *civic responsibility* dalam PKn seringkali belum cukup eksplisit dan sistematis. Beberapa kajian menunjukkan bahwa program PKn cenderung menekankan pada *civic knowledge* dan keterampilan, tetapi aspek disposisi kewarganegaraan, yang mencakup tanggung jawab moral dan sosial, kurang mendapat perhatian dalam desain kurikulum dan pembelajaran (Fierna et al., 2025). Padahal, pembentukan *civic responsibility* tidak hanya terkait dengan pemahaman teoritis, tetapi juga dengan pembentukan karakter dan perilaku yang diwujudkan melalui pengalaman belajar yang kontekstual, reflektif, dan kolaboratif.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, kajian teoretis yang komprehensif diperlukan untuk menegaskan kembali landasan konsep *civic responsibility* maupun implikasinya dalam pembelajaran PKn. Kajian ini bertujuan untuk mengurai konsep, dimensi, dan peran *civic responsibility* dalam pendidikan kewarganegaraan serta menawarkan pemahaman atas pendekatan pembelajaran yang relevan untuk mendorong implementasi nilai-nilai tersebut secara sistematis. Kajian semacam ini penting untuk memperkuat dasar teoritis yang menjadi pijakan bagi pengembangan kurikulum dan praktik pembelajaran yang lebih efektif dalam menumbuhkan sikap tanggung jawab sebagai warga negara.

Dengan memperkuat pemahaman teoretis dan empiris tentang *civic responsibility* dalam konteks pembelajaran PKn, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pendidikan kewarganegaraan serta memberikan arah bagi praktik pembelajaran yang mampu menjawab tuntutan pendidikan abad ke-21 yang semakin kompleks dan dinamis.

## METODE

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian teoretis (literature review). Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mengkaji, menganalisis, dan mensintesis berbagai konsep, teori, serta temuan penelitian yang berkaitan dengan *civic responsibility* dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Kajian teoretis memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan konsep dan pendekatan pembelajaran PKn, sekaligus mengidentifikasi kecenderungan dan kesenjangan penelitian yang ada. Dalam penelitian pendidikan, literature review dipandang sebagai metode yang tepat untuk memperkuat landasan konseptual dan memberikan pemetaan keilmuan secara sistematis (Maulana & Milanti, 2023).

### Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber pustaka ilmiah yang relevan dengan topik kajian. Sumber tersebut meliputi artikel jurnal nasional dan internasional, buku akademik, prosiding ilmiah, serta dokumen kebijakan pendidikan yang membahas Pendidikan Kewarganegaraan dan *civic responsibility*. Untuk menjaga kebaruan dan relevansi kajian, literatur yang digunakan dibatasi pada publikasi sepuluh tahun terakhir (2015–2025). Pembatasan waktu ini penting agar analisis yang dilakukan mencerminkan perkembangan mutakhir dalam kajian PKn dan pendidikan kewarganegaraan, sebagaimana dianjurkan dalam penelitian berbasis kajian pustaka di bidang pendidikan (Usmi, 2023).

### Tekni Penelusuran Literatur

Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis melalui beberapa basis data ilmiah, antara lain Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ), serta jurnal nasional terakreditasi. Kata kunci yang digunakan dalam penelusuran literatur mencakup “*civic responsibility*”, “*civic education*”, “Pendidikan Kewarganegaraan”, “*civic disposition*”, dan “*citizenship education*”. Proses penelusuran dilakukan secara berulang dengan variasi kata kunci untuk memastikan ketercakupan literatur yang relevan. Artikel yang ditemukan kemudian diseleksi secara bertahap dengan memperhatikan kesesuaian judul, abstrak, dan isi artikel terhadap fokus kajian (Xiao & Watson, 2019).

Dalam proses seleksi literatur, penelitian ini menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi guna menjamin kualitas sumber yang dianalisis. Kriteria inklusi meliputi artikel yang secara substantif membahas *civic responsibility*, Pendidikan Kewarganegaraan, atau pembelajaran kewarganegaraan dalam konteks pendidikan formal, serta dipublikasikan dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup artikel yang tidak relevan dengan fokus kajian, publikasi non-ilmiah, artikel opini, serta sumber yang memiliki duplikasi konten. Penerapan kriteria ini bertujuan untuk memastikan bahwa kajian didasarkan pada literatur yang kredibel dan relevan secara akademik (Kitchenham et al., 2015).

### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tahapan identifikasi, seleksi, dan pengorganisasian literatur yang terpilih. Artikel dan sumber pustaka yang telah memenuhi kriteria kemudian dikelompokkan berdasarkan tema utama, seperti konsep civic responsibility, dimensi civic responsibility, peran Pendidikan Kewarganegaraan, serta tantangan pembelajaran PKn dalam penguatan tanggung jawab kewarganegaraan. Proses pengorganisasian ini membantu peneliti dalam memetakan pola pemikiran dan kecenderungan temuan dari berbagai sumber yang dianalisis (Butler et al., 2021).

### Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis). Analisis dimulai dengan membaca secara mendalam setiap sumber literatur untuk memahami konteks dan substansi pembahasan. Selanjutnya, peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul terkait civic responsibility dalam pembelajaran PKn, kemudian mengelompokkan dan membandingkan pandangan para ahli. Hasil analisis tersebut disintesis untuk membangun pemahaman konseptual yang utuh mengenai peran dan posisi civic responsibility dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Pendekatan ini umum digunakan dalam kajian literatur pendidikan karena mampu menghasilkan sintesis teori yang mendalam dan sistematis (Forbes, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Kajian

#### 1. Konsep dan Definisi Civic Responsibility dalam Pendidikan

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa *civic responsibility* merupakan konsep sentral dalam pendidikan kewarganegaraan yang merujuk pada kesadaran, sikap, dan komitmen individu untuk menjalankan peran serta kewajibannya sebagai warga negara secara bertanggung jawab. Civic responsibility tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap hukum dan norma sosial, tetapi juga mencakup partisipasi aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan kemasyarakatan. Dalam konteks pendidikan, civic responsibility diposisikan sebagai hasil dari proses internalisasi nilai kewarganegaraan yang berlangsung secara berkelanjutan melalui pembelajaran yang bermakna dan berorientasi nilai (Borhan, 2025; Saputri & Marzuki, 2021).

Beberapa literatur menegaskan bahwa civic responsibility memiliki keterkaitan erat dengan konsep *civic disposition* dan *civic engagement*. Civic responsibility dipandang sebagai landasan moral dan sikap yang mendorong individu untuk terlibat secara sadar dan etis dalam kehidupan publik. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya bertujuan membekali peserta didik dengan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), tetapi juga membentuk karakter kewarganegaraan yang tercermin dalam perilaku bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari (Ordu, 2021).

## 2. Dimensi dan Indikator Civic Responsibility

Berdasarkan kajian terhadap berbagai sumber pustaka, civic responsibility memiliki beberapa dimensi utama, antara lain tanggung jawab sosial, partisipasi kewarganegaraan, kepatuhan terhadap hukum dan norma, serta sikap etis dalam kehidupan publik. Dimensi tanggung jawab sosial berkaitan dengan kepedulian terhadap kepentingan bersama dan komitmen untuk menjaga harmoni sosial, sedangkan partisipasi kewarganegaraan mencakup keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial, politik, dan kemasyarakatan secara sukarela dan bertanggung jawab (Myoung & Liou, 2022).

Selain itu, kepatuhan terhadap hukum dan norma sosial merupakan indikator penting civic responsibility karena mencerminkan kesadaran individu terhadap aturan dan nilai yang mengatur kehidupan bernegara. Dimensi etika publik menekankan pada kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral dalam berinteraksi di ruang publik. Dalam konteks pendidikan, indikator-indikator tersebut digunakan sebagai rujukan untuk mengembangkan pembelajaran PKn yang berorientasi pada pembentukan sikap dan perilaku kewarganegaraan, bukan semata-mata penguasaan materi kognitif (Cicilia & Santoso, 2022; Dewi et al., 2020)

## 3. Peran PKn dalam Mengembangkan Civic Responsibility

Hasil kajian menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis sebagai wahana utama dalam pengembangan civic responsibility. PKn dirancang untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, kesadaran hak dan kewajiban warga negara, serta komitmen terhadap konstitusi dan kehidupan berbangsa. Melalui PKn, peserta didik diarahkan untuk memahami perannya sebagai warga negara yang tidak hanya patuh terhadap aturan, tetapi juga memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial (Regi & Anggraeni, 2021).

Literatur juga menegaskan bahwa PKn berfungsi sebagai pendidikan nilai dan karakter, sehingga penguatan civic responsibility tidak dapat dilepaskan dari proses pembelajaran yang menekankan refleksi, dialog, dan pengalaman sosial. Keberhasilan pembelajaran PKn tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari perubahan sikap dan perilaku peserta didik yang mencerminkan tanggung jawab kewarganegaraan dalam kehidupan nyata, baik di lingkungan pendidikan maupun masyarakat luas (Haerani & Muliati, 2024).

## 4. Pendekatan Pembelajaran PKn yang Relevan dengan Penguatan Civic Responsibility

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang bersifat kontekstual, partisipatif, dan reflektif memiliki relevansi tinggi dalam penguatan civic responsibility. Pendekatan *Contextual Teaching and Learning* (CTL) memungkinkan peserta didik mengaitkan konsep PKn dengan realitas kehidupan sosial, sehingga nilai-nilai kewarganegaraan tidak dipahami secara abstrak, melainkan dialami secara nyata melalui konteks sosial di sekitarnya (Misqa et al., 2024).

Selain itu, pembelajaran berbasis diskusi, studi kasus, dan isu-isu aktual dinilai efektif dalam mendorong keterlibatan aktif peserta didik serta menumbuhkan sikap

tanggung jawab terhadap pendapat dan keputusan yang diambil. Integrasi media digital dalam pembelajaran PKn juga ditemukan dapat memperkaya pengalaman belajar dan memperluas ruang partisipasi kewarganegaraan, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada desain pedagogis dan pendampingan dosen atau guru (Kiesa et al., 2022).

## 5. Tantangan Penguatan Civic Responsibility dalam Pembelajaran PKn

Hasil kajian literatur mengungkapkan bahwa penguatan civic responsibility melalui pembelajaran PKn masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah dominasi pendekatan pembelajaran konvensional yang berorientasi pada hafalan materi dan penilaian kognitif semata. Kondisi ini menyebabkan nilai-nilai kewarganegaraan kurang terinternalisasi secara mendalam karena peserta didik tidak memperoleh pengalaman belajar yang reflektif dan bermakna (Noe et al., 2021).

Di era digital, tantangan tersebut semakin kompleks dengan munculnya rendahnya literasi kewarganegaraan digital, maraknya disinformasi, serta menurunnya etika berinteraksi di ruang publik digital. Literatur menunjukkan bahwa tanpa pendekatan pembelajaran PKn yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sosial, upaya penguatan civic responsibility berpotensi tidak berjalan optimal.

## Pembahasan

Hasil kajian menunjukkan bahwa *civic responsibility* merupakan konsep fundamental dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama PKn sebagai wahana pembentukan warga negara yang bertanggung jawab. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa PKn tidak hanya berfungsi mentransmisikan pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga menanamkan disposisi dan karakter kewarganegaraan yang tercermin dalam sikap dan perilaku nyata peserta didik (Zulfikar & Dewi, 2021). Dengan demikian, civic responsibility dapat dipahami sebagai outcome pembelajaran PKn yang bersifat afektif dan konatif, yang menuntut pendekatan pembelajaran lebih dari sekadar penyampaian materi normatif.

Dimensi-dimensi civic responsibility yang teridentifikasi dalam hasil kajian, seperti tanggung jawab sosial, partisipasi kewarganegaraan, kepatuhan terhadap hukum, dan etika publik, menunjukkan bahwa civic responsibility bersifat multidimensional. Hal ini memperkuat pandangan bahwa pengembangan civic responsibility tidak dapat dicapai melalui satu strategi pembelajaran tunggal, melainkan memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan pengetahuan, sikap, dan pengalaman belajar sosial peserta didik (Miranda, 2025). Oleh karena itu, pembelajaran PKn yang hanya menekankan aspek kognitif berpotensi gagal membentuk civic responsibility secara utuh.

Pembahasan hasil kajian juga menegaskan bahwa peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan civic responsibility sangat bergantung pada bagaimana pembelajaran dirancang dan diimplementasikan. PKn yang berorientasi pada nilai dan karakter menuntut adanya proses refleksi, dialog, dan keterlibatan aktif peserta didik dalam membahas isu-isu kewarganegaraan yang kontekstual. Temuan ini menguatkan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa internalisasi nilai

kewarganegaraan lebih efektif ketika peserta didik diberi ruang untuk mengalami, mendiskusikan, dan merefleksikan realitas sosial secara kritis (Hanif & Salsabillah, 2024).

Pendekatan pembelajaran kontekstual dan partisipatif yang teridentifikasi dalam hasil kajian memiliki implikasi penting terhadap desain pembelajaran PKn. Pembelajaran kontekstual memungkinkan peserta didik menghubungkan konsep kewarganegaraan dengan pengalaman kehidupan nyata, sehingga civic responsibility tidak dipahami sebagai konsep abstrak, melainkan sebagai sikap yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan teori *Contextual Teaching and Learning* yang menekankan pembelajaran bermakna melalui keterkaitan antara materi dan konteks sosial peserta didik (Reddy & Revathy, 2024).

Selain itu, pembahasan ini juga menegaskan peran media digital sebagai sarana pendukung dalam penguatan civic responsibility. Integrasi media digital dalam pembelajaran PKn membuka peluang untuk memperluas ruang partisipasi kewarganegaraan, meningkatkan akses terhadap isu-isu publik, serta mendorong keterlibatan peserta didik dalam diskursus kewarganegaraan di ruang digital. Namun demikian, literatur juga mengingatkan bahwa penggunaan media digital harus disertai dengan pendampingan pedagogis yang memadai agar tidak justru memperkuat disinformasi dan perilaku tidak etis di ruang publik digital (Clark & Schmeichel, 2024).

Tantangan yang teridentifikasi dalam hasil kajian, khususnya dominasi pendekatan pembelajaran konvensional dan rendahnya integrasi pengalaman belajar kontekstual, menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal PKn dan praktik pembelajaran di lapangan. Tantangan ini menuntut reorientasi pembelajaran PKn menuju pendekatan yang lebih reflektif, partisipatif, dan adaptif terhadap perkembangan sosial serta teknologi. Tanpa perubahan paradigma pembelajaran, upaya penguatan civic responsibility berpotensi bersifat simbolik dan tidak berdampak signifikan terhadap perilaku kewarganegaraan peserta didik (Noe et al., 2021).

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa civic responsibility merupakan elemen kunci dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang harus dikembangkan secara sistematis melalui pendekatan pembelajaran yang kontekstual, partisipatif, dan berorientasi nilai. Hasil kajian ini memberikan implikasi teoretis bahwa pengembangan civic responsibility perlu ditempatkan sebagai tujuan strategis PKn, sekaligus menjadi dasar bagi pengembangan model pembelajaran dan penelitian lanjutan yang berfokus pada implementasi dan inovasi pembelajaran kewarganegaraan di era digital.

## KESIMPULAN

Berdasarkan kajian teoretis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *civic responsibility* merupakan elemen esensial dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang berperan penting dalam membentuk warga negara yang bertanggung jawab, partisipatif, dan berkarakter demokratis. Civic responsibility tidak hanya dipahami sebagai pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga

mencakup sikap, nilai, dan perilaku nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kajian ini menunjukkan bahwa penguatan civic responsibility dalam pembelajaran PKn menuntut pendekatan pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan berorientasi pada pengalaman belajar peserta didik. Pembelajaran PKn yang bersifat teoritis dan berpusat pada hafalan memiliki keterbatasan dalam menginternalisasikan nilai-nilai kewarganegaraan, sehingga kurang efektif dalam membentuk sikap tanggung jawab kewarganegaraan secara berkelanjutan. Selain itu, integrasi pembelajaran kontekstual dan pemanfaatan media digital secara pedagogis memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan civic responsibility. Media digital dapat memperluas ruang partisipasi, meningkatkan literasi kewarganegaraan, serta mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam isu-isu publik, asalkan digunakan secara terarah dan kritis dalam kerangka pembelajaran PKn.

Secara keseluruhan, kajian teoretis ini menegaskan bahwa civic responsibility harus ditempatkan sebagai tujuan strategis dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Temuan kajian ini diharapkan dapat menjadi landasan konseptual bagi pengembangan model, strategi, dan penelitian empiris selanjutnya yang berfokus pada inovasi pembelajaran PKn guna memperkuat karakter dan tanggung jawab kewarganegaraan peserta didik di era digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Borhan, H. (2025). *Civic Education as a Pathway to Inclusive Societies*. 326.
- Butler, C. R., O'Hare, A. M., Kestenbaum, B. R., Sayre, G. G., & Wong, S. P. Y. (2021). An introduction to qualitative inquiry. *Journal of the American Society of Nephrology*, 32(6), 1275–1278.
- Cicilia, I., & Santoso, G. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Upaya Membentuk Generasi Penerus Bangsa yang Berkarakter. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. 01(03), 146–155.
- Clark, C. H., & Schmeichel, M. (2024). Can education save us from ourselves? Three psychological challenges to democracy. *Review of Educational Research*, 00346543241288245.
- Dewi, R. R., Suresman, E., & Suabuana, C. (2020). PENDIDIKAN KARAKTER DI PERSEKOLAHAN. 1(2), 71–84.
- Fierna, M., Lusie, J., Yuli, D., Rahmat, M., & Febriyanti, N. (2025). Menumbuhkan Tanggung Jawab Sosial Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 5(2), 43–49.
- Forbes, M. (2022). *Thematic analysis: A practical guide*. Sage Publications Sage UK: London, England.
- Haerani, N., & Muliati, S. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Bangsa pada Siswa Sekolah Dasar. 2(02).
- Hanif, M., & Salsabillah, N. A. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan Di Era Digital

- (Perspektif Teori Sosialisasi Politik). *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, 11(2), 273–307.
- Hasanah, U. (2024). (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial). *JURNAL PENDIS*, 3(2), 1–10.
- Kiesa, A., Bueso, L., Hodgins, E., & Kahne, J. (2022). Educating about elections in a partisan age. *Social Education*, 86(4), 232–238.
- Kitchenham, B. A., Budgen, D., & Brereton, P. (2015). *Evidence-based software engineering and systematic reviews*. CRC press.
- Maulana, M. Y., & Milanti, A. A. (2023). A systematic literature review on civic engagement program through citizenship education. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(2), 341–358.
- Miranda, D. (2025). Civic education as a tool to mitigate social inequalities in civic outcomes: a literature review. *Research Handbook on Education and Democracy*, 322–341.
- Misqa, L., Oviana, W., Hayati, Z., & Jannah, M. (2024). Improving Student Learning Outcomes in Mathematics Learning through a Contextual Teaching and Learning Approach in Elementary Schools. *Journal of Indonesian Primary School*, 1(2), 19–26.
- Murtiningsih, I., Fatimah, S., Harsan, T., & Prasetya, A. (2022). *MENUMBUHKAN CIVIC DISPOSITION PESERTA DIDIK DI MASA*. 09(2), 141–147.
- Myoung, E., & Liou, P.-Y. (2022). Systematic review of empirical studies on international large-scale assessments of civic and citizenship education. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 66(7), 1269–1291.
- Noe, W., Hasmawati, H., & Rumkel, N. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan Karakter menurut pemikiran Udin S. Winataputra. *Untirta Civic Education Journal*, 6(1).
- Ordu, U. B.-A. (2021). The Role of Teaching and Learning Aids/Methods in a Changing World. *Bulgarian Comparative Education Society*.
- Reddy, P. J. K., & Revathy, K. (2024). Contextual learning. In *Digital Skill Development for Industry 4.0* (pp. 83–104). Auerbach Publications.
- Regi, P., & Anggraeni, D. (2021). *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Keterkaitan Dengan Pendidikan Karakter di Indonesia*. 1(2), 33–40.
- Saputri, R. M., & Marzuki, M. (2021). The role of parents and society in value education and civic education. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2), 268–275.
- Usmi, R. (2023). Analisis Kewarganegaraan Global dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan. *Journal of Civics and Moral Studies*, 8(1), 1–9.
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112.
- Zulfikar, M. F., & Dewi, D. A. (2021). MEMBANGUN KARAKTER BANGSA Muhamad Fikri Zulfikar , Dinie Anggraeni Dewi. *Jurnal PEKAN*, 6(1), 104–115.